



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO
Kecamatan Dawarblandong



Jln. Mayjen Sungkono No. 61 Pulorejo



Dawarblandong.mojokertokab.go.id



085608818385

Kata Pengantar

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

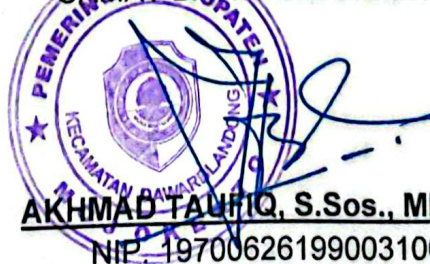
Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

LKjIP Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 memuat informasi mengenai perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan akuntabel mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Dawarblandong, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Mojokerto, 13 Januari 2026

CAMAT DAWARBLANDONG



AKHMAD TAUFIQ, S.Sos., MM., Kp.
NIP. 197006261990031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 menyusun 2 Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun setelah penetapan periode perencanaan baru 2025-2029. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan total 1 indikator kinerja dan 1 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan dengan 4 indikator kinerja dan 4 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	89	89,93	101,04%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	83,31	102,53%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,30%	95,61%	98,26%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	85,59 (Tinggi)	101,89%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	1 Inovasi	100%

2. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89,00	89,93	101,04%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,25	83,31	102,53%
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Kinerja keuangan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 3.379.457.584,00 atau 95,61% dari total pagu anggaran sebesar Rp 3.534.622.000,00.

Capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 8
I.1 Latar Belakang.....	8
I.2 Gambaran Umum	9
I.3 Isu-isu Strategis	12
I.4 Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 15
II.1 Penjenjangan Strategis	15
II.2 Indikator Kinerja Utama	4
II.3 Perjanjian Kinerja.....	6
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 9
III.1 Pengukuran Kinerja	9
III.2 Analisis Kinerja	11
III.3 Prestasi Kinerja Lainnya	22
III.4 Akuntabilitas Anggaran	22
 BAB IV PENUTUP.....	 24
 LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Dokren 2021-2025)

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Dokren 2025-2029)

Tabel II.5 Anggaran Per Program

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan SPM

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Wilayah Kecamatan Dawarblandong

Gambar I.2 Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong

Gambar III.1 Grafik Perbandingan Nilai SAKIP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Landasan hukum penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur secara teknis mekanisme penyusunan dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

LKjIP merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu periode anggaran, yang diukur berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat hasil pengukuran kinerja, analisis capaian, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan kinerja, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengumpulan data kinerja, analisis capaian kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan kinerja disusun secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LKjIP memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, LKjIP menjadi instrumen untuk menilai konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja yang telah dicapai.

Selanjutnya, LKjIP berperan penting sebagai bahan evaluasi dan umpan balik (feedback) dalam penyusunan perencanaan kinerja pada periode berikutnya. Hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam LKjIP digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, program, dan kegiatan, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Kecamatan Dawarblandong secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

I.2 Gambaran Umum

Kecamatan Dawarblandong merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kewilayahan. Secara geografis, Kecamatan Dawarblandong terletak di bagian utara Kabupaten Mojokerto dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain. Adapun batas wilayah Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Gresik
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemlagi dan Kab Lamongan

Wilayah Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 Desa, dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, Kecamatan Dawarblandong memiliki jumlah penduduk 52.217 jiwa, yang tersebar secara proporsional di seluruh desa. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Dawarblandong memiliki dinamika pelayanan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang cukup kompleks.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dawarblandong didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga pendukung sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, kecamatan juga didukung oleh aset berupa sarana dan prasarana perkantoran serta fasilitas penunjang pelayanan publik. Seluruh sumber daya tersebut dikelola secara optimal guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembinaan wilayah.

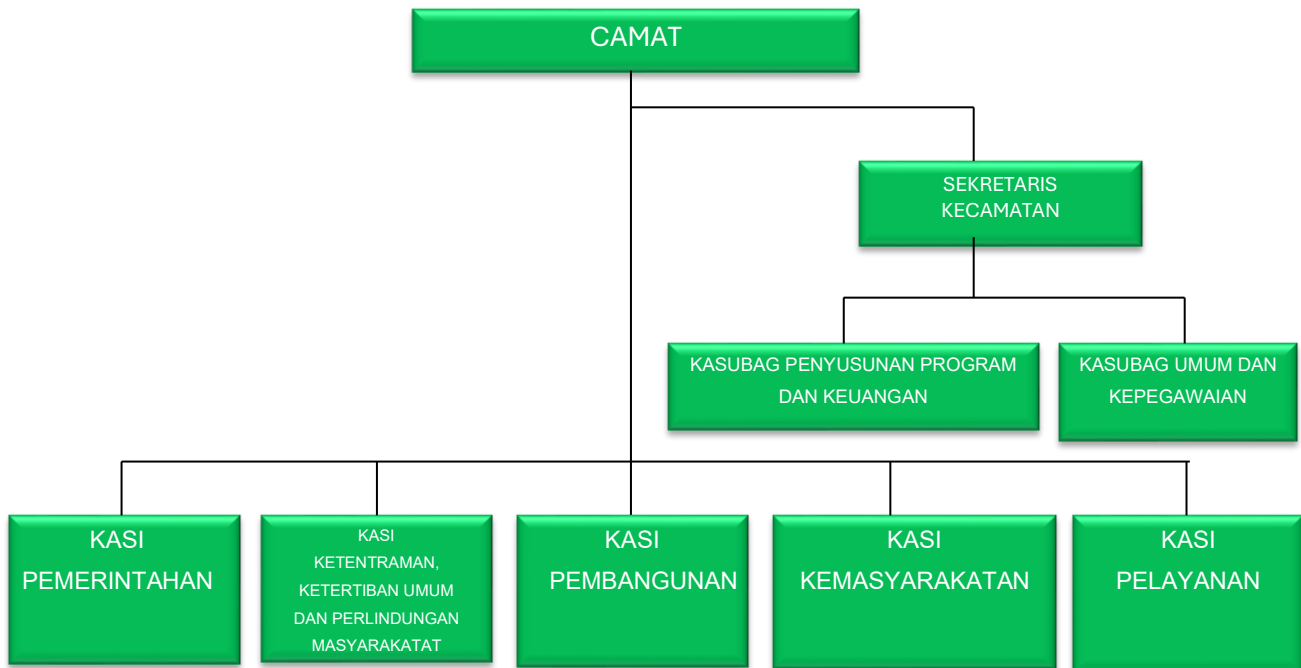
Berdasarkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan, Kecamatan Dawarblandong dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, menyelenggarakan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat dibantu oleh sekretariat kecamatan dan beberapa seksi sesuai struktur organisasi yang berlaku. Sekretariat kecamatan berperan dalam pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, masing-masing seksi melaksanakan fungsi teknis sesuai bidangnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pembangunan di wilayah kecamatan.

Struktur organisasi Kecamatan Dawarblandong disusun untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan serta memperkuat koordinasi antarunit kerja. Dengan struktur organisasi tersebut, Kecamatan Dawarblandong diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembinaan pemerintahan desa, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Struktur organisasinya, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAWARBLANDONG



Gambar I.2 Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong

Susunan organisasi kecamatan mencakup Camat di puncak hierarki. Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan. Struktur organisasi juga meliputi beberapa seksi utama seperti Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pelayanan.

I.3 Isu-isu Strategis

Dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dawarblandong pada Tahun 2025 dihadapkan pada berbagai isu strategis yang dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi serta dinamika lingkungan eksternal. Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan kecamatan agar selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Mojokerto serta kebijakan nasional.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong menunjukkan capaian yang relatif baik, khususnya pada pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan desa, serta fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan, serta hasil koordinasi pemerintahan desa yang ditindaklanjuti. Namun demikian, masih terdapat hal-hal kritis yang perlu mendapat perhatian, antara lain meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan, serta perlunya penguatan kualitas pelayanan yang lebih adaptif dan inovatif.

2. Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Dawarblandong menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar perencanaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, luasnya wilayah pelayanan dan tingginya intensitas koordinasi dengan pemerintahan desa turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas kecamatan.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Nasional

Permasalahan dan capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong berimplikasi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, kecamatan juga berperan dalam mendukung pencapaian program nasional dan internasional, seperti pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa.

4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan

Tantangan utama yang dihadapi Kecamatan Dawarblandong meliputi perubahan kebijakan secara dinamis, peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, serta kebutuhan akan percepatan digitalisasi pelayanan pemerintahan. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, potensi ekonomi lokal, serta dukungan kebijakan daerah yang mendorong penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat wilayah.

5. Formulasi Isu Strategis dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan kondisi tersebut, isu-isu strategis Kecamatan Dawarblandong diformulasikan sebagai perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan standar pelayanan publik, optimalisasi koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-isu strategis ini menjadi catatan penting dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Dawarblandong pada tahun-tahun berikutnya, guna mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto.

I.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Dawarblandong selama tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan Laporan Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB IV PENUTUP

Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021-2025 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama *“melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat”*, mendukung pencapaian misi ke-3:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:
Tabel II.1A Matriks Penjenjangan Strategis (Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal				IKM Kecamatan	89
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal			IKM Kecamatan	89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25
				Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	90,12%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN PD	67,2
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen
	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar Pelayanan	1.100 pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	25 Laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70 fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Dokumen

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 4 misi. Visi Kabupaten Mojokerto adalah

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kabupaten Mojokerto memiliki 4 misi yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan dengan tugas utama *“melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat”*, mendukung pencapaian misi ke-1:

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis Sesuai Dokumen Perencanaan 2025-2029

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan	89
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan	89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program yang tercapai sesuai target	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90,12%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang / bulan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				IP ASN Perangkat Daerah	67,2
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen
Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 kendaraan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	25 laporan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 fasilitasi
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Dokumen
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	20 Dokumen

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Kecamatan Dawarblandong memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2.A Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Terwujudnya pelayanan public yang optimal	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma-E
	Terselenggara nya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan
	Terselenggara nya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi
	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
		Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	(Jumlah Realisasi Anggaran / Jumlah Pagu anggaran) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	IP ASN Kecamatan Ket: Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM
	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Inovasi Kecamatan

Tabel II.2.B Indikator Kinerja Utama (sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
----	-------------------	-------------------------	--------	----------------------	-------------

	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma-E
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2024, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- Perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran/pejabat ditetapkan. Perjanjian Kinerja Camat Dawarblandong

Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	89

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,30%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025, sebagai berikut:

Tabel II.3.B Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.167.451.200

No	Program	Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 16.000.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 184.000.000

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2025-2029)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,25
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.5 Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.086.622.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.800.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 433.200.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Dawarblandong tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025. Terdapat 2 Perjanjian Kinerja yang terealisasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Pengukuran realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2021-2025 sebagai berikut :

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;

Tabel III.1.a Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89	89,93	101,04%

Selain kinerja strategis di Perjanjian Kinerja periode 2021-2025 juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25	83,31	102,53%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,30%	95,61%	98,26%

	Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	85,59	101,89%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	1 inovasi	100%

Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai kinerja periode perencanaan 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;

Tabel III.1.b Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
(Sesuai Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi 2025	Capaian
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	0	0	0	89,93	89,93	101,04%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,25	0	0	83,31	0	83,31	102,53%
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Kecamatan Dawarblandong memiliki 2 Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memiliki 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja dan 4 kinerja lainnya dengan 6 indikator kinerja.

Formulasi perhitungan seluruh sasaran strategis dengan indikator kinerja dan seluruh kinerja lainnya dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ---- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
2.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	Jumlah layanan yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah pelayanan yang terlayani	Laporan Hasil Pelayanan
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti ----- ----- x 100% Jumlah dokumen hasil koordinasi	Dokumen Hasil Koordinasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5.		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Nilai	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Prosentase realisasi anggaran}}{\text{-----}} \times 100\%$ Tingkat kepuasan terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran
6.		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah IP ASN Perangkat Daerah}}{\text{-----}} \times 100\%$ Tingkat kepuasan terhadap IP ASN Perangkat Daerah	Nilai IP ASN
7.	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Inovasi	Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pelayanan melalui pembangunan inovasi}}{\text{-----}} \times 100\%$ Tingkat kepuasan terhadap pelayanan melalui pembangunan inovasi	Laporan Pelaksanaan Inovasi

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai	IKM Kecamatan Ket: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00 Total dari Nilai Persepsi per Unsur ----- ---- x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Laporan Hasil Sukma-E
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Nilai SAKIP Kecamatan Ket: Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
3.	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	Persentase	Jumlah layanan yang terlayani sesuai standar ----- ----- x 100% Jumlah pelayanan yang terlayani	Laporan Hasil Pelayanan
3.	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	Jumlah dokumen hasil koordinasi yang ditindaklanjuti ----- ----- x 100% Jumlah dokumen hasil koordinasi	Dokumen Hasil Koordinasi

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel III.2.A Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80	80,66	88,50	89,97	89,93	87	105%

Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 89,93 angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 89,75 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 89,93. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

- a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit
- b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
- c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai, terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib
- d. Transparansi serta kepastian layanan

Selain sasaran di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dokumen perencanaan periode 2021-2025) juga terdapat kinerja tambahan berupa kinerja lainnya, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%		
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,40	77,20	78,89	81,05	83,31	-	-
		B. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84%	85%	86,17 %	97,27 %	95,61 %	-	-
		C. Indeks Profesionalitas ASN	N/A	64,66	77,54	83,59	85,59	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	1	1	1		

1. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
 - B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
 - C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan
2. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh wargaCapaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
 - B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
 - C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala
3. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,31. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
 - B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
 - C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indicator
 - D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
 - E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi
4. Capaian indikator “Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 95,61%. Angka capaian tersebut didapatkan dari perbandingan capaian anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah

dilakukan diantaranya :

- A. Perencanaan anggaran yang matang
 - B. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
 - C. Adanya Evaluasi realisasi yang dilakukan secara berkala
 - D. Koordinasi yang baik antar PPTK, bendahara, dan PA
 - E. Kepatuhan terhadap aturan pengelolaan keuangan
5. Capaian indikator “Indeks Profesionalitas ASN” pada sasaran strategis Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 85,59. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen Nilai IP ASN. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
- A. Adanya penilaian kinerja yang Objektif
 - B. Adanya Komitmen Pimpinan dalam Pembinaan ASN
 - C. Penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan
6. Capaian indikator “Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan” pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 1 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
- A. Adanya penyebaran inovasi kepada ASN dan masyarakat
 - B. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung
 - C. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
 - D. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi

Tabel III.2.B Perbandingan Realisasi Kinerja
(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89,97	89,93
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,05	83,31
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	N/A	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%

1. Capaian indikator “IKM Kecamatan” pada sasaran strategis Terwujudnya pelayanan publik yang optimal di tahun 2025 adalah sebesar 89,93 angka capaian tersebut didapatkan dari rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 1 yakni sebesar 89,75 dan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disemester 2 yakni sebesar 89,93. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Kualitas pelayanan yang baik , meliputi waktu, prosedur serta persyaratan yang tidak berbelit
 - b. Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Ramah
 - c. Sarana dan prasarana yang cukup memadai , terdiri dari ruang tunggu yang nyaman, fasilitas yang ramah disabilitas serta system antrian yang tertib
 - d. Transparansi serta kepastian layanan

2. Capaian indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran strategis Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di tahun 2025 adalah sebesar 83,31. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target

tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
- B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
- C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator
- D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi

3. Capaian indikator “Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” pada sasaran strategis Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari akumulasi laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. SOP yang terdokumentasi dan mudah dipahami
- B. Adanya Budaya kerja yang responsif dan ramah
- C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelayanan

4. Adanya laman pengaduan yang mudah diakses oleh wargaCapaian indikator “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti” pada sasaran strategis Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen hasil koordinasi yang telah di tindaklanjuti ditahun berjalan. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya penanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap koordinasi
- B. Tidak saling lempar tanggung jawab antar bidang/bagian
- C. Dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

Tabel III.2.C Perbandingan Realisasi Kinerja

(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2021-2025)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	a. Nilai Sakip	74,40	77,20	78,89	81,05	83,31		
		b. Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1	1	1	1	1		

1. Capaian Indikator “Nilai Sakip Perangkat Daerah” pada sasaran program Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel di Tahun 2025 adalah sebesar 83,31. Angka capaian tersebut didapatkan dari nilai yang ada pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun berjalan. Penilaian AKIP tersebut meliputi penilaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :
 - A. Adanya dokumen perencanaan kinerja yang terukur dan relevan
 - B. Tim SAKIP memahami regulasi dan teknis penyusunan
 - C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator
 - D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
 - E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi
2. Capaian indikator "Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada sasaran strategis Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah di tahun 2025 adalah sebesar 1 inovasi. Angka capaian tersebut didapatkan dari dokumen laporan inovasi. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya:
 - A. Adanya penyebaran inovasi kepada ASN dan masyarakat
 - B. Adanya dukungan sumber daya terutama Sarana dan prasarana mendukung
 - C. Dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
 - D. Dokumentasi dan Legalitas yang Kuat pada setiap inovasi

Tabel III.2.D Perbandingan Realisasi Kinerja

(Sesuai dengan Dokumen Perencanaan Periode 2025-2029)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan	89,97	89,93

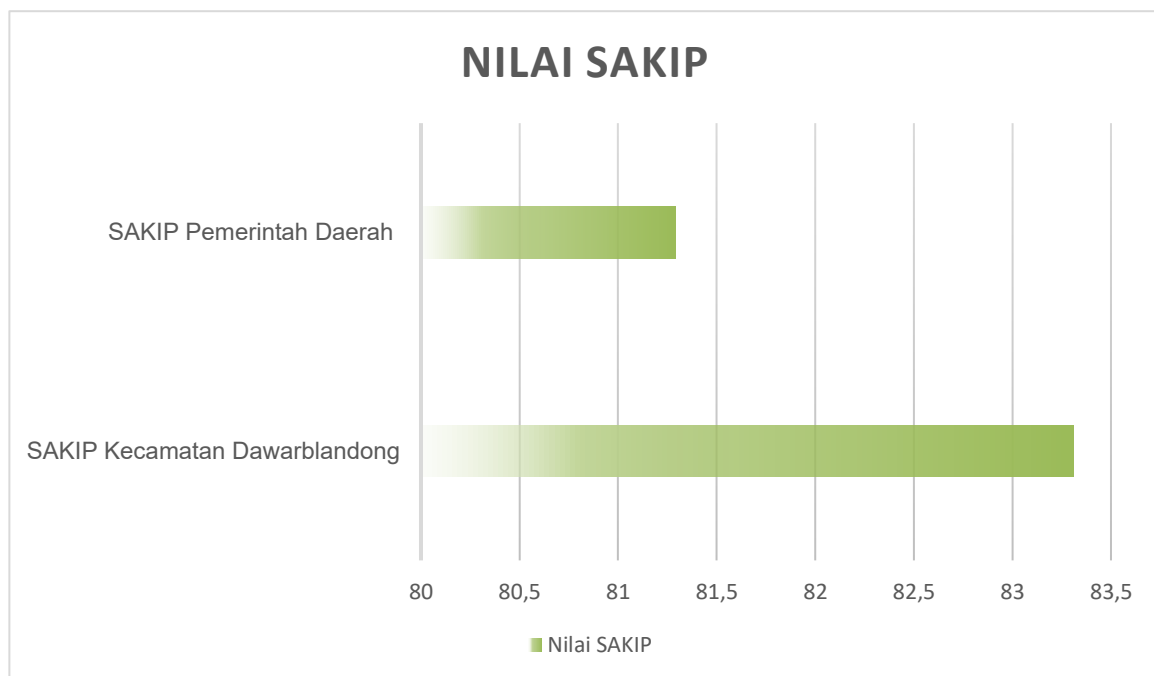
1. Capaian Indikator “Nilai IKM Kecamatan” pada sasaran program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik di Tahun 2025 adalah sebesar 89,93. Keberhasilan capaian target tersebut dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya :

- A. Adanya Peningkatan Kualitas Pelayanan
- B. Peningkatan Kompetensi dan Perilaku Aparatur
- C. Adanya Program/kegiatan yang mendukung langsung pencapaian indikator
- D. Data capaian indikator valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- E. Tertib Administrasi dan Dokumentasi

III.3 Prestasi Kinerja Lainnya

Dengan bantuan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, akuntabilitas kinerja di Kabupaten Mojokerto, khususnya Kecamatan Dawarblandong, lebih sistematis, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi AKIP Kecamatan Dawarblandong yang mendapatkan predikat A dengan nilai sebesar 83,31. Peningkatan kinerja juga dibuktikan melalui nilai SAKIP Kecamatan Dawarblandong yang lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 81,05.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto dengan rincian, sebagai berikut :



III.4 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Kecamatan Dawarblandong tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.534.622.000,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 3.379.457.584,00 atau sebesar 95,61% dari total pagu anggaran dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel III.4
Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.086.622.000,00	Rp. 2.820.471.365,00	91,37%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.800.000,00	Rp. 13.169.164,00	88,98%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 433.200.000,00	Rp. 385.224.254,00	88,92%

Berdasarkan capaian program tersebut, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan keuangan, sebagai berikut:

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	Rp. 3.086.622.000,00	Rp. 2.820.471.365,00	91,37%
		Persentase Realisasi Anggaran	97,30%	95,61%	98,26%			
2	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	100%	Rp. 14.800.000,00	Rp. 13.169.164,00	88,98%
3	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	Rp. 433.200.000,00	Rp. 385.224.254,00	88,92%
			Rata-rata capaian		100 %	Total capaian		95,61%

Dengan Capaian kinerja sebesar 100% dan capaian Keuangan sebesar 95,61%, efisiensi kinerja Kecamatan Dawarblandong sebesar 4,39%.

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang cukup baik, tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang berjalan sesuai dengan rencana serta tingkat pencapaian indikator kinerja yang sebagian besar telah memenuhi target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Begitu pula untuk capaian anggaran, dari pagu anggaran Kecamatan Dawarblandong Tahun 2025 sebesar Rp. 3.534.622.000,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.379.457.584,00 atau 95,61%.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal optimalisasi pelayanan, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas permasalahan wilayah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Ke depan, Kecamatan Dawarblandong berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah desa/kelurahan, dan pengembangan inovasi pelayanan publik. Selain itu, upaya penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan disiplin dan akuntabilitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi akan terus dioptimalkan guna mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Dawarblandong pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Dawarblandong.

LAMPIRAN

3. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD TAUFIQ, S.Sos., MM.
Jabatan : CAMAT DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

CAMAT DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos, MM.
Pembina Tk. I
NIP 197006261990031006

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	89

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,25 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,30%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.167.451.200	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 16.000.000	APBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 184.000.000	APBD 2025

Mojokerto, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

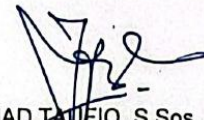
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

CAMAT DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO



AKHMAD TAUFIQ, S.Sos, M.M.
Pembina Tk. I
NIP 197006261990031006

4. Perjanjian Kinerja P APBD Tahun 2025

10/7/25, 8:08 AM

41. PK CAMAT DAWARBLANDONG 2025 FIX.docx - Google Dokumen



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Taufiq, S.Sos., MM., Kp
Jabatan: Camat Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Albarraa
Jabatan: Bupati Mojokerto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto

Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Camat Dawarblandong
Kabupaten Mojokerto

Akhmad Taufiq, S.Sos., MM., Kp
Pembina Tingkat II IVb
NIP 197006261990031006

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,25
3	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%
4	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.086.622.000,00	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 14.800.000,00	PAPBD 2025
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 433.200.000	PAPBD 2025

Mojokerto, 30 September 2025

Pihak Kedua
Bupati Mojokerto


Muhammad Albarraa

Pihak Pertama
Camat Dawarblandong
Kabupaten Mojokerto


Akhmad Tauliq, S.Sos., MM., Kp
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP 197006261990031006

